EFEKTIVITAS PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Elisabeth Citra Kerans
NPP. 33.0668
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: citrakerans147@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof.Dr.Drs.Hyronimus Rowa,M.Si
Email: hyronimus_rowa@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *This study focuses on the effectiveness of the Child Protection Program in Ende Regency, implemented by the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A). Although the program has been carried out to protect and ensure the fulfillment of children's rights, several challenges are still encountered, such as limited human resources, budget constraints, and suboptimal program coordination, resulting in the program's effectiveness not being fully achieved. Previous studies on the effectiveness of Child Protection Programs generally discuss program implementation in a broad context, whereas studies that specifically examine the effectiveness of the implementation of the Child Protection Program by the Public safety, public order, and community protection Division of the Civil Service Police Unit of Ende Regency based on Subarsono's effectiveness indicators remain limited.****Purpose:*** *The objective of this study is to analyze the effectiveness of child protection programs, the supporting and inhibiting factors influencing the implementation of these programs, as well as the efforts undertaken to address issues of violence against children.****Method:*** *This study employed a qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The data were analyzed using the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing.****Result:*** *The results of the study indicate that the effectiveness of the child protection program in Ende Regency has not been effective, although improvements are still needed in several aspects. Factors affecting the program include limited human resources and budget constraints. Nevertheless, there have been positive efforts undertaken by the local government, such as the establishment of child protection institutions and the improvement of complaint services.****Conclusion:*** *The conclusion of this study is that the child protection program in Ende Regency still requires improvement in terms of implementation, coordination, and resource support. Therefore, it is recommended that the local government enhance institutional capacity, strengthen cross-sectoral cooperation, and expand public awareness campaigns in order to improve the effectiveness of the child protection program.*
Keywords:*, Child protection, Ende Regency, Public policy, , Program effectiveness*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/*Research Gap*): Penelitian ini berfokus pada efektivitas Program Perlindungan Anak di Kabupaten Ende yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Meskipun program telah dilaksanakan untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak anak, masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta koordinasi pelaksanaan program yang belum optimal sehingga efektivitas program belum tercapai secara maksimal. Penelitian sebelumnya mengenai efektivitas Program Perlindungan Anak umumnya membahas implementasi program secara umum, sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas pelaksanaan Program Perlindungan Anak oleh Bidang Trantibumlinmas Satpol PP Kabupaten Ende berdasarkan indikator efektivitas menurut Subarsono masih terbatas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program perlindungan anak,faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program serta upaya mengatasi masalah kekerasan **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data dengan reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan.. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan efektivitas program perlindungan anak di Kabupaten Ende belum efektif dan diperlukan ditingkat dalam beberapa aspek. Beberapa faktor yang memengaruhinya antara lain keterbatasan sumber daya manusia,serta keterbatasan anggaran. Meskipun demikian, terdapat upaya-upaya positif yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti pembentukan lembaga perlindungan anak dan peningkatan layanan pengaduan. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa program perlindungan anak di Kabupaten Ende masih memerlukan peningkatan dalam aspek implementasi, koordinasi, dan dukungan sumber daya. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta memperluas sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan efektivitas program perlindungan anak.

Kata Kunci: Efektivitas program, Perlindungan anak, Kebijakan publik, Kabupaten Ende

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era digitalisasi kondisi yang mendukung adanya diskriminasi terus terjadi di Indonesia,kondisi ini pula yang menjadi salah satu perhatian bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terlebih dikhususkan untuk wilayah Kabupaten Ende. Diskriminasi yang sering terlihat adalah ketika terjadinya tindak kekerasan. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dapat mengarah pada tindakan kriminal sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan,dimana bentuk tindakan kekerasan ini dapat berupa intimidasi,penghinaan moral,pemukulan dan eksploitasi anak dan sebagainya. Tindak kekerasan yang dilakukan seseorang juga bertentangan dengan hak asasi manusia,sehingga masalah kekerasan sering mendapatkan perhatian khusus untuk dicari solusinya. Penelitian mengenai efektivitas Program Perlindungan Anak telah banyak dilakukan oleh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Destiawan dan Eviany (2023) menjelaskan

bahwa pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sukoharjo telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak. Hartanto (2023) menyatakan bahwa evaluasi Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kota waringin Timur menunjukkan pelaksanaan program belum optimal akibat belum adanya regulasi yang spesifik, keterbatasan fasilitas, serta kurangnya dukungan lintas sektor. Selanjutnya, Verina, Pamungkas, dan Suryapuspita (2023) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cilacap telah memberikan hasil yang baik, namun kasus kekerasan terhadap anak masih berfluktuasi sehingga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan pemahaman masyarakat. Selain itu, Achsani dan Jaftoran (2025) menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Polewali Mandar berkontribusi dalam menurunkan angka perkawinan usia anak, meskipun masih menghadapi berbagai hambatan dalam koordinasi dan pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Program Perlindungan Anak sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak.Sebagai upaya perlindungan anak,Pemerintah Daerah Kabupaten Ende telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende.Namun dalam Implementasi Peraturan Daerah ini kasus kekerasan yang terjadi kepada anak di Kabupaten Ende tidak menunjukan adanya penurunan di tiap tahunnya.

Menurut data yang tersedia,di bulan Agustus Tahun 2025 sudah terdapat 50 Kasus yang telah ditemukan terkait kekerasan anak di Kabupaten Ende dan diprediksi akan meningkat sampai akhir tahun 2025 nanti.Rincian kasus tersebut meliputi kasus kekerasan seksual,kasus kekerasan fisik,intimidasi serta kasus perundungan terhadap anak. Dengan adanya kasus-kasus ini menunjukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih menghadapi tantangan yang cukup krusial serta membutuhkan peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten Ende. Keragaman tantangan dalam upaya perlindungan anak di Kabupaten Ende mengharuskan isu ini menjadi agenda prioritas dalam rangka pengembangan pembangunan. Komitmen yang kuat dari Pemerintah ,pembaruan kebijakan yang berlandaskan hak anak penambahan sumber daya anggaran, serta partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor kunci dalam memastikan efektivitas program perlindungan anak di daerah Kabupaten Ende.Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membuat beberapa program perlindungan anak diantaranya program perlindungan perempuan dan keluarga termasuk anak,program pemenuhan hak anak,dan program kabupaten layak anak. Namun, kenyataan di Kabupaten Ende menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan anak masih terus berlangsung, meskipun pemerintah daerah bersama instansi terkait telah menjalankan berbagai program perlindungan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan implementasi di lapangan,kesadaran masyarakat karena budaya dan pemahaman yang telah ada dianggap mutlak dan hal yang tabu untuk dilaksanakan.

Kementerian Dalam Negeri melalui pembinaan Satpol PP menekankan pentingnya sinergi urusan perlindungan anak dengan urusan Trantibumlinmas melalui pedoman teknis serta peningkatan kapasitas aparatur. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan anak sangat bergantung pada kesiapan aparat tata pamong dalam memastikan keamanan sosial masyarakat.

Dengan demikian, efektivitas program perlindungan anak harus dipandang sebagai bagian integral dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, terutama urusan Trantibumlinmas. Satpol PP sebagai unsur pelaksana tata pamong yang dibina oleh Kemendagri memiliki peran strategis dalam pencegahan, penindakan awal, penegakan perda, serta penciptaan ruang publik yang aman bagi anak Oleh karena itu, penguatan efektivitas program perlindungan anak membutuhkan pendekatan menyeluruh yang memadukan aspek pelayanan, penegakan hukum administratif, dan sinergi lintas sektor untuk mewujudkan perlindungan masyarakat secara optimal.

Melihat pentingnya permasalahan ini,penelitian mengenai Efektivitas Program Perlindungan Anak di Kabupaten Ende sangat relevan.Oleh karena hal ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Program Perlindungan Anak di Kabupaten Ende".

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Penelitian Destiawan dan Eviany (2023), Hartanto (2023), Verina dkk. (2023), serta Achsani dan Jaftoran (2025) lebih berfokus pada evaluasi maupun implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menggunakan teori implementasi kebijakan atau model evaluasi program, seperti model CIPP dan teori Edward III, dengan penekanan pada pelaksanaan kebijakan dan pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak.

Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena mengkaji efektivitas Program Perlindungan Anak di Kabupaten Ende dengan menggunakan teori efektivitas program menurut Subarsono, yang menilai program melalui lima dimensi, yaitu ketepatan sasaran, ketepatan pelaksanaan, ketepatan waktu, ketepatan administrasi, dan ketepatan hasil. Selain menganalisis tingkat efektivitas program, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program, serta mendeskripsikan upaya penanganan kekerasan terhadap anak melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Hingga saat penelitian ini dilakukan, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas Program Perlindungan Anak di Kabupaten Ende dengan menggunakan perspektif teori efektivitas Subarsono. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian tersebut sekaligus memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi peningkatan penyelenggaraan program perlindungan anak di Kabupaten Ende.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai efektivitas Program Perlindungan Anak di Kabupaten Ende memiliki urgensi yang tinggi mengingat masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak serta belum optimalnya pelaksanaan program perlindungan anak di daerah tersebut. Anak merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga memerlukan perlindungan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) telah melaksanakan berbagai program, seperti Program Kabupaten Layak Anak (KLA), Desa

Layak Anak, pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD), Tim Pencegah Kekerasan di Sekolah, serta kegiatan sosialisasi perlindungan anak. Namun demikian, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta sistem informasi dan pendataan yang belum terintegrasi secara baik. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya capaian program dalam menekan angka kekerasan terhadap anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang mampu menilai sejauh mana efektivitas Program Perlindungan Anak di Kabupaten Ende dengan menggunakan teori efektivitas Subarsono yang meliputi dimensi ketepatan sasaran, ketepatan pelaksanaan, ketepatan waktu, ketepatan administrasi, dan ketepatan hasil. Penelitian ini juga penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program serta menganalisis upaya penanganan kekerasan terhadap anak yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Ende, khususnya DP3A, dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Perlindungan Anak sehingga pelaksanaan program menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi setiap anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik di bidang pemerintahan daerah, khususnya mengenai efektivitas program perlindungan anak yang hingga saat ini masih relatif terbatas, terutama pada konteks Kabupaten Ende.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan pedoman bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Susanti dan Pratiwi (2021) berjudul *Evaluasi Efektivitas Program Perlindungan Anak di Indonesia: Pendekatan Kualitatif pada Kasus Kekerasan Domestik* menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program perlindungan anak, seperti layanan konseling Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, efektif menurunkan kekerasan fisik pada tahap awal hingga sekitar 60%, namun belum mampu mencegah kekerasan dalam jangka panjang karena lemahnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar koordinasi lintas sektor diperkuat, kapasitas sumber daya manusia dalam pendampingan korban ditingkatkan, program pendidikan masyarakat dikembangkan, serta dilakukan evaluasi secara berkala agar program perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Hoa Hong Nguyen, Kien G. To, Van T.H. Hoang, Lu Gram, dan Kathryn M. Yount (2025) berjudul *The Effectiveness of Gender-Based Violence Prevention among Adolescents aged 10–19 Years in Southeast Asia: A Systematic Review* menggunakan metode *systematic review.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar program pencegahan kekerasan berbasis gender di Asia Tenggara dilakukan melalui pendidikan partisipatif di sekolah yang mampu meningkatkan pengetahuan peserta, namun efektivitasnya dalam mengubah sikap dan perilaku masih beragam. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan desain *randomized controlled trial*

(RCT), memperluas cakupan negara penelitian, mengukur perubahan perilaku secara nyata, serta mengembangkan model pembelajaran yang memadukan kegiatan di sekolah dengan media pembelajaran digital melalui media sosial..

Maulana (2025) berjudul *Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual Anak di Kota Palangkaraya* menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Satgas Perlindungan Anak di tingkat kelurahan, serta menjalin kerja sama lintas sektor sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya pelaporan kasus, keterbatasan tenaga profesional, dan masih kuatnya budaya patriarki. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar pemerintah meningkatkan kampanye anti kekerasan, memperluas sosialisasi prosedur pelaporan, serta melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mengurangi budaya patriarki.

Adisiti dan Meilani (2024) berjudul *Efektivitas Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru* menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru telah memberikan pelayanan perlindungan kepada korban kekerasan, namun efektivitas pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, serta belum optimalnya kerja sama dengan masyarakat. Peneliti menyarankan agar pemerintah meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, memperkuat dukungan anggaran, melengkapi sarana prasarana, serta meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat dalam upaya perlindungan anak.

Yosi Yarli dan Agus Suriadi (2024) berjudul *Efektivitas Program Perlindungan Anak Perempuan dari Kekerasan Seksual: Studi Evaluatif pada Dinas PP dan PA Kota Medan* menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3APMP2KB Kota Medan telah melaksanakan berbagai program, seperti sosialisasi, pendampingan korban, dan pelatihan tenaga pendamping, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar pemerintah meningkatkan alokasi sumber daya, mencari alternatif pendanaan, memperkuat koordinasi lintas sektor melalui sistem komunikasi yang lebih efektif, serta melaksanakan program yang bertujuan menghilangkan stigma terhadap korban kekerasan seksual.

Berdasarkan penelitian terdahulu, efektivitas program perlindungan anak dipengaruhi oleh sumber daya manusia, anggaran, koordinasi antarinstansi, sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini berbeda karena berfokus pada efektivitas Program Perlindungan Anak di Kabupaten Ende menggunakan teori efektivitas Subarsono sehingga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan pelaksanaan program.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah (scientific novelty) dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menganalisis efektivitas Program Perlindungan Anak di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan menggunakan teori efektivitas program menurut Subarsono yang meliputi dimensi ketepatan sasaran, ketepatan pelaksanaan, ketepatan waktu, ketepatan administrasi, dan ketepatan hasil. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada implementasi kebijakan, evaluasi Program Kabupaten Layak Anak, atau penanganan kasus kekerasan terhadap anak, penelitian ini memberikan penilaian secara komprehensif terhadap tingkat efektivitas pelaksanaan program perlindungan anak berdasarkan lima dimensi efektivitas tersebut.

Selain menganalisis tingkat efektivitas program, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program serta upaya penanganan kekerasan terhadap anak melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian di bidang pemerintahan daerah, khususnya mengenai efektivitas program perlindungan anak, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Ende dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan perlindungan anak secara berkelanjutan.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program perlindungan anak,faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program serta upaya mengatasi masalah kekerasan.

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Pendekatan deskriptif kualitatif berfokus pada upaya memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena melalui penafsiran data secara kontekstual, tanpa melakukan perlakuan atau eksperimen terhadap variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Tujuan utama pendekatan ini bukan untuk menghasilkan generalisasi, melainkan untuk mengungkap makna, pola, serta dinamika yang muncul di balik fenomena yang diteliti.

Pada penelitian ini, konsep utama yang dikaji adalah efektivitas program perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Ende berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.Campbell,D.T (1989) menyatakan bahwa *"efektivitas pada dasarnya diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan"*. Suatu program dianggap efektif apabila pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, memberikan hasil yang diharapkan, serta mendapat dukungan dari berbagai pihak yang terlibat. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas program perlindungan anak dipahami sebagai kemampuan DP3A Kabupaten Ende dalam mewujudkan tujuan perlindungan terhadap anak melalui program yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Dalam penelitian mengenai efektivitas program perlindungan anak di Kabupaten Ende ini, sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui kegiatan penelitian di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat

secara langsung dalam pelaksanaan program perlindungan anak di Kabupaten Ende, seperti petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, aparat pemerintah daerah, serta masyarakat penerima manfaat program. Data ini digunakan untuk mengetahui secara langsung bagaimana efektivitas program tersebut berjalan di lapangan.Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis atau dokumentasi yang relevan dengan penelitian. Data ini dapat berupa laporan kegiatan, arsip, peraturan daerah, publikasi resmi, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang berkaitan dengan perlindungan anak. Data sekunder digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan valid.

Informan penelitian adalah individu atau pihak yang memberikan informasi relevan dan diperlukan dalam proses pengumpulan data. Informan dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatannya dalam pelaksanaan program perlindungan anak di Kabupaten Ende.Dalam penelitian ini, informan ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan peneliti sebagai instrumen utama (human instrument) yang berperan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data secara langsung di lapangan. Selain itu, digunakan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi untuk memperoleh data terkait efektivitas Program Perlindungan Anak di Kabupaten Ende berdasarkan lima dimensi efektivitas Subarsono, yaitu ketepatan sasaran, ketepatan pelaksanaan, ketepatan waktu, ketepatan administrasi, dan ketepatan hasil, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi pelaksanaan program secara komprehensif.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perepuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende, dengan fokus penelitian pada keefektivan pelaksanaan program perlindungan anak di Kbaupaten Ende . Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan Maret hingga April 2026, yang mencakup proses wawancara,observasi serta dokumentasi. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan tentang keefektivan program Perlindungan anak di Kbaupaten ende beserta faktor pendukung dan penghambat program dan menjelaskan tentang upaya mengatasi masalah kekerasan di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mencakup berbagai upaya dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Ende, khususnya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan didukung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende.Program perlindungan anak harus bersifat berkelanjutan dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.

Adapun hasil penelitian dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1.Efektivitas Program Perlindungan Anak

Berdasarkan teori Subarsono, salah satu indikator efektivitas program yang pertama adalah ketepatan sasaran, yaitu sejauh mana program mampu menjangkau kelompok target yang telah ditetapkan. Dalam Program Perlindungan Anak di Kabupaten Ende, sasaran utama adalah seluruh anak, khususnya anak rentan seperti korban kekerasan, anak terlantar, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah cukup tepat sasaran karena menjangkau anak hingga ke wilayah pelosok melalui berbagai kegiatan seperti Program Kabupaten Layak Anak (KLA), Desa Layak Anak, serta daerah aman anak yang didukung oleh Satpol PP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 08 Januari 2026, Program Perlindungan Anak dilaksanakan melalui KLA, Desa Layak Anak, dan kawasan aman anak yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak, serta telah menjangkau beberapa desa di Kabupaten Ende seperti Ndiko Sapu, Ekolea, Ekoae, Welamosa, Randoria, dan Fataatu Timur. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak menyatakan bahwa program difokuskan pada anak usia sekolah yang rentan terhadap kekerasan melalui sosialisasi di SD dan SMP serta patroli Satpol PP pada jam sekolah (08.30–11.00 WITA) dan patroli malam secara berkala, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam jumlah personel dan pemerataan pengawasan.

Secara keseluruhan, ketepatan sasaran Program Perlindungan Anak di Kabupaten Ende dapat dikatakan cukup efektif karena telah menyasar kelompok anak sebagai target utama dan memberikan pemahaman kepada siswa terkait perlindungan diri serta pelaporan kekerasan. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pemerataan pelaksanaan program, terutama di wilayah terpencil, sehingga diperlukan peningkatan jangkauan dan pemerataan agar seluruh anak dapat memperoleh manfaat secara optimal.

Indikator yang kedua yaitu Ketepatan pelaksana Program Perlindungan Anak di Kabupaten Ende menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi, seperti DP3A sebagai leading sector, Satpol PP, pemerintah desa, UPTD PPA, Forum Anak, dan LSM. Hasil wawancara menunjukkan adanya sinergi lintas sektor yang cukup baik, ditandai dengan meningkatnya respons cepat terhadap laporan kasus serta koordinasi yang efektif dalam penanganan perlindungan anak.

Selain itu, Satpol PP berperan aktif melalui patroli, penertiban, dan pengawasan di ruang publik serta koordinasi dengan DP3A dan sekolah, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan personel dan anggaran. Secara keseluruhan, ketepatan pelaksana dinilai cukup efektif karena setiap pihak telah menjalankan perannya, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas SDM, pemerataan sumber daya, dan penguatan sistem koordinasi agar pelaksanaan program lebih optimal.

Ketepatan waktu pelaksanaan Program Perlindungan Anak di Kabupaten Ende secara umum telah berjalan sesuai perencanaan, terutama dalam kegiatan Kabupaten Layak Anak dan Desa Layak Anak yang dilaksanakan secara bertahap melalui sosialisasi dan pembinaan rutin. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan padatnya jadwal kegiatan yang menyebabkan beberapa program harus dijadwalkan ulang. Selain itu, patroli Satpol PP juga kadang mengalami penundaan akibat keterbatasan personel dan kegiatan lain yang bersamaan, sehingga ketepatan waktu dinilai cukup efektif tetapi belum sepenuhnya optimal.

Indikator yang ketiga yaiut,Ketepatan waktu pelaksanaan Program Perlindungan Anak di Kabupaten Ende secara umum telah berjalan sesuai perencanaan, terutama dalam kegiatan Kabupaten Layak Anak dan Desa Layak Anak yang dilaksanakan secara bertahap melalui sosialisasi dan pembinaan rutin. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan padatnya jadwal kegiatan yang menyebabkan beberapa program harus dijadwalkan ulang. Selain itu, patroli Satpol PP juga kadang mengalami penundaan akibat keterbatasan personel dan kegiatan lain yang bersamaan, sehingga ketepatan waktu dinilai cukup efektif tetapi belum sepenuhnya optimal.

Indikator yang keempat yaitu,Ketepatan administrasi Program Perlindungan Anak di Kabupaten Ende telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditandai dengan adanya dokumen perencanaan, laporan kegiatan, serta pencatatan kasus oleh DP3A dan Satpol PP. Setiap proses penanganan kasus juga dilakukan secara sistematis mulai dari penerimaan laporan, registrasi, hingga pendampingan korban.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa sistem pendataan yang belum terintegrasi dan pemutakhiran data yang belum optimal. Secara keseluruhan, administrasi program sudah berjalan cukup baik dan tertib, namun masih perlu peningkatan dalam sistem informasi dan pengelolaan data agar lebih akurat dan efektif.

Indikator yang kelima yaitu ketepatan hasil Program Perlindungan Anak di Kabupaten Ende menunjukkan bahwa program telah memberikan dampak positif, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat, penurunan kasus tertentu, serta terciptanya lingkungan yang lebih aman bagi anak. Hal ini juga terlihat dari berkurangnya anak yang berkeliaran pada jam sekolah dan meningkatnya peran keluarga dalam perlindungan anak.

Namun demikian, hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak di beberapa wilayah serta belum meratanya pelaksanaan program. Secara keseluruhan, ketepatan hasil dinilai cukup efektif, tetapi masih memerlukan penguatan implementasi, pengawasan, dan pemerataan program agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara maksimal.

Penulis menyimpulkan berdasarkan kelima indikator efektivitas menurut Subarsono, yaitu ketepatan sasaran, ketepatan pelaksana, ketepatan waktu, ketepatan administrasi, dan ketepatan hasil, dapat disimpulkan bahwa Program Perlindungan Anak di Kabupaten Ende tergolong cukup efektif, namun belum optimal.Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta belum meratanya pelaksanaan program di seluruh wilayah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dalam berbagai aspek agar efektivitas program dapat lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

3.2.Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa Program Perlindungan Anak di Kabupaten Ende telah berjalan dan memberikan kontribusi dalam upaya perlindungan serta pemenuhan hak anak. Berdasarkan lima dimensi efektivitas menurut Subarsono, program ini telah memenuhi sebagian besar indikator efektivitas, khususnya pada aspek ketepatan sasaran, kejelasan tujuan program, dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Hal ini menunjukkan bahwa DP3A Kabupaten Ende telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan korban, edukasi, serta koordinasi dengan berbagai pihak.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa efektivitas program belum optimal. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, luasnya wilayah pelayanan, serta belum meratanya pelaksanaan sosialisasi di seluruh desa dan kecamatan. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya jangkauan pelayanan dan pemantauan terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program perlindungan anak tidak hanya ditentukan oleh kinerja DP3A, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, masyarakat, serta keluarga sebagai lingkungan utama tumbuh kembang anak. Dengan demikian, efektivitas perlindungan anak memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

3.3.Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah bahwa meningkatnya jumlah laporan kasus kekerasan terhadap anak tidak selalu menunjukkan meningkatnya angka kekerasan. Sebaliknya, kondisi tersebut dapat mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh DP3A Kabupaten Ende. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan mulai memberikan dampak positif terhadap keberanian masyarakat dalam mencari perlindungan hukum dan pendampingan.

Temuan menarik lainnya adalah adanya peran penting kerja sama lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program perlindungan anak. DP3A tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani kasus anak, melainkan membutuhkan koordinasi dengan kepolisian, rumah sakit atau puskesmas, lembaga pendidikan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta lembaga layanan lainnya. Kolaborasi tersebut mempercepat proses penanganan korban, pemulihan psikologis, serta penyelesaian kasus secara komprehensif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor budaya dan kondisi sosial masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan terhadap anak sebagai persoalan keluarga sehingga enggan melaporkannya kepada pihak berwenang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan pola pikir masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi, sosialisasi, dan penguatan peran keluarga.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa keberadaan program perlindungan anak belum sepenuhnya dikenal oleh seluruh masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi penyebarluasan informasi perlu ditingkatkan agar akses masyarakat terhadap layanan perlindungan anak semakin luas dan merata.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Perlindungan Anak di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur belum berjalan secara efektif. Ditinjau dari lima dimensi efektivitas menurut Subarsono, program telah tepat sasaran dan terlaksana sesuai perencanaan, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, koordinasi, serta sistem informasi yang belum terintegrasi sehingga hasil yang dicapai belum optimal. Faktor pendukung program meliputi sosialisasi oleh DP3A, pembentukan Tim Pencegah Kekerasan di Sekolah, Program Kabupaten Layak Anak (KLA), Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD), serta dukungan LSM. Sementara itu, faktor penghambat utama adalah keterbatasan SDM, anggaran, dan pengelolaan data. Upaya penanganan kekerasan terhadap anak telah dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya dan fasilitas pendukung agar pelaksanaan program lebih optimal.

Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi yang hanya dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende, keterbatasan waktu penelitian, keterbatasan akses terhadap beberapa data dan dokumen, serta penggunaan pendekatan kualitatif yang menyebabkan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan secara luas.

Arah Masa Depan Penelitian *(future work)*. Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama maupun di daerah lain terkait efektivitas Program Perlindungan Anak di Kabupaten Ende, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Ende dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan penelitian serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Achsani, N., & Jaftoran, F. (2025). Implementation of Child-Friendly District Program in Reducing Child Marriage. https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v7i1.5562

Destiawan, R. I., & Eviany, E. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. *Jurnal Tatapamong (IPDN)*. https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/jurnaltatapamong/article/view/3538

Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama*. https://www.gramedia.com/products/perlindungan-hukum-terhadap-anak-dan-perempuan

Hardiyanto, A., & Saryono (2023). Perlindungan Anak dari Kekerasan: Perspektif Hukum dan HAM. Yogyakarta: Deepublish, https://deepublishstore.com/shop/perlindungan-anak-dari-kekerasan/

Hartanto, C. A. (2023). Evaluation of Child Friendly District Policy Implementation (KLA). *Jurnal Tatapamong*. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3711

Makhfudz, S.H., M.Si(2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Surabaya https://repository.unair.ac.id/

Miles,Huberman dan Saldana (2021). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 4th ed. New York: SAGE, https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128

Nurhanisah, N., & Maifizar, A. (2025). Dampak Implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam Upaya Perlindungan Anak di Kabupaten Aceh Barat. https://doi.org/10.24815/jsu.v19i1.43821

Ramadhan, S (2024). Hak Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional. Bandung: Pustaka https://deepublishstore.com/shop/hak-anak-dalam-perspektif-hukum-nasional-dan-internasional/

Rossevelt, F. A., & Uthami, N. R. (2024). Implementation of Child Protection Policy in Realizing Child-Friendly Information System. *Jurnal Publik*. https://doi.org/10.52434/jp.v19i01.541

Simangunsong, Fernandes(2017). Metode Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/jt

Subarsono, A.G(2011). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Belajar https://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/administrasi/analisis-kebijakan-publik

Sugiyono (2013). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta https://www.gramedia.com/products/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd

Sutama (2016). Definisi Operasional: Ciri, Contoh, Cara Menyusunnya. Yogyakarta: Deepublish 88–97. https://deepublishstore.com/shop/definisi-operasional/

Syafri, Wirman(2012). Kajian Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Erlangga, https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i3.132

Uul Resia, & Widayanti, S. (2024). *Kota Layak Anak: Antara Label dan Substansi Pemenuhan Hak Anak. JIRReG Journal*. https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.624

Verina, V., Pamungkas, D. B., & Suryapuspita, M. (2023). Kabupaten Layak Anak: Kebijakan dalam Melindungi Hak Anak di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan (IPDN)*. https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JKP/article/view/3376